

Laporan Riset



Mengakar dan Menyebar?

Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia
di Masa Kemunduran Demokrasi

Untuk jadi perhatian:

Laporan ini disusun oleh Asia Research Centre, Universitas Indonesia (ARC UI) dan Research Centre for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada (POLGOV UGM) dengan dukungan dari Yayasan Kurawal. Pandangan yang tertulis di dalam laporan ini merupakan perspektif penulis dan tidak mewakili perspektif Yayasan Kurawal.

Informasi lebih lanjut:

<https://arc.ui.ac.id/>

<https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/>

Laporan berbahasa Inggris telah disirkulasikan untuk publik terbatas dan sudah ditarik dari peredaran, tidak untuk disebarluaskan dan tidak untuk pengutipan.

Cara mengutip laporan ini:

Savirani, A., Yasih, D.W.P, Rakhmani, I., Suryani, I., Firdasari, A.Y., Rose, N., Bestari, D.A. Ayunisa, F. (2025). *Mengakar atau Menyebarkan?: Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi*. Depok, Jawa Barat dan D.I. Yogyakarta: ARC UI dan POLGOV UGM.

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi buku ini dilindungi dengan lisensi Creative Common BY-NC-SA.



Daftar Isi

Halaman Penafian	2
Daftar Isi	3
Daftar Boks	3
Daftar Istilah.....	4
Selayang Pandang/ <i>Executive Summary</i>	5
Temuan Utama/ <i>Key Findings</i>	6
Pendahuluan	8
Konteks Sejarah	9
Kerangka Berpikir	11
Konsep Utama	11
Metode	12
Temuan Utama	13
Kontradiksi dalam Lingkungan Regulasi	13
Paradoks Profesionalisasi	15
Otonomi Lokal yang Relatif	18
Rizoma Gerakan Orang Muda	19
Kesimpulan	22
Daftar Pustaka	25

Daftar Boks

Boks 1. Definisi Masyarakat sipil	8
Boks 2. Pertanyaan Penelitian	9
Boks 3. Kemunduran Demokrasi Abad-21	9
Boks 4. Melemahnya Politik Kelas di Utara dan Selatan-Global	10
Boks 5. Warisan Orde Baru dalam Masyarakat Sipil Indonesia	11
Boks 6. Konsep Utama	12
Boks 7. Temuan 1: Lingkungan Regulasi yang Kontradiktif	15
Boks 8. Temuan 2: Paradoks Profesionalisme	17
Boks 9. Temuan 3: Otonomi Lokal yang Relatif	19
Boks 10. Temuan 4: Politik “Baru”?	22
Boks 11. Rekomendasi Berbasis Riset	24

Daftar Tabel

Tabel 1. Tipe-tipe OMS	15
------------------------------	----

Daftar Istilah

AS	Amerika Serikat
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BPP	Blok Politik Pelajar
CSO	<i>Civil Society Organisation</i>
DFAT	<i>(Australian) Department of Foreign Affairs and Trade</i>
DRL	Dewan Rakyat Lampung
GSI	<i>Geographic Information System</i>
G-to-g	<i>Government-to-Government</i>
GIZ	<i>The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GTRA	Gugus Tugas Reformasi Agraria
HAM	Hak Asasi Manusia
ICSF	<i>Indonesian Civil Society Forum</i>
JATAM	Jaringan Advokasi Tambang
KBB	Koalisi Kebebasan Berpendapat
Kepmen	Keputusan Menteri
Kepres	Keputusan Presiden
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LGBT	Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
Munas	Pertemuan Nasional
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Ormas	Organisasi Masyarakat
Perpres	Peraturan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
Renstra	Rencana Strategis Pembangunan Nasional
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMI	<i>Social Movement Institute</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU TKS	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU TPKS	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

SELAYANG PANDANG¹

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia mengalami peningkatan kerentanan dan stagnasi dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi (Setiawan, 2023). Meskipun tergolong resilien (Setiawan & Tomsa, 2023), jumlah OMS Indonesia terus berfluktuasi juga membuat mereka mengalami kesulitan dalam membentuk strategi dan tindakan terkonsolidasi, misalnya menantang naiknya elit ekonomi politik ke kursi kepresidenan pada 2024.

Dalam konteks politik terkini, penelitian ini mengkaji sejumlah dimensi yang berkontribusi pada kerentanan tersebut. Terutama bagaimana warisan Orde Baru turut membentuk struktur teknisalisasi kinerja berbagai OMS dan kemudian berkontribusi pada depolitisasi dampak-dampak mereka. Dengan demikian, meskipun kapasitas transparansi dan akuntabilitas OMS meningkat, koneksi mereka dengan basis massa melemah, mengurangi keterampilan mereka untuk mendukung kekuatan politik yang mendorong reformasi pro-demokrasi.

Namun, OMS Indonesia belum sepenuhnya kehilangan kekuatan. Sejumlah keberhasilan dalam mendorong reformasi regulasi, seperti disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-undang Disabilitas, telah berkontribusi pada kemajuan agenda Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih luas. OMS juga berperan penting dalam mengawasi, serta mendorong perbaikan fungsi berbagai lembaga pemerintah dan institusi demokrasi.

EXECUTIVE SUMMARY²

Almost three decades after Reformasi, Indonesian Civil society Organisations (CSOs) have experienced increased vulnerability and stagnation in promoting democratic values (Setiawan, 2023). Although considered resilient (Setiawan and Tomsa, 2023), the number of Indonesian CSOs has fluctuated, they have struggled to form consolidated strategies and actions to, for example, challenge the rise of political and economic elites to the presidency in 2024.

With the current political setting in mind, this research examines the dimensions that contribute to this vulnerability. Particularly, how the New Order legacy has shaped the technicalisation of CSOs' work and has contributed to the depoliticisation of their impacts. Thus, although CSOs' transparency and accountability capacities have increased, their connections with their mass base have weakened, reducing their ability to support political forces that can drive pro-democracy reforms.

Nevertheless, the political forces of Indonesian CSOs are not entirely undermined. There have been some successes in pushing for regulatory reforms, such as the enactment of the Sexual Violence Prevention Law (UU TPKS) and the Disability Law, which have contributed to broader human rights agenda advancement. CSOs have also played an important role in monitoring and promoting improvements in the functioning of various government institutions and democratic institutions.

1 Riset ini adalah upaya kolaboratif antara ARC UI dan POLGOV UGM. Amalinda Savirani, peneliti utama, dan Diatyka W.P. Yasih, ko-peneliti utama, memimpin kajian ini, sementara Inaya Rakhmani memberikan saran. Tim terdiri dari Indah Suryani, Afifa Y. Firdasanti, Naysilla Rose, dan Dwi Aini Bestari, yang berpartisipasi dalam proses penelitian. Tim mengucapkan terima kasih ke semua anggota dan informan kami, dan juga Social Movement Institute (Naysilla Rose) dan Blok Politik Pelajar (Muzaffar di Jakarta dan Munif di Semarang) yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan data. Laporan ini juga mendapat masukan berharga dari putaran lokakarya di Bandung, Semarang, Lombok, dan Lampung, juga dari para pemangku kepentingan OMS.

2 This research is a collaborative effort between ARC UI and POLGOV UGM. Amalinda Savirani, the principal investigator, and Diatyka W.P. Yasih, the co-principal investigator, led this study, while Inaya Rakhmani provided advice. The team consists of Indah Suryani, Afifa Y. Firdasanti, Naysilla Rose, and Dwi Aini Bestari, who participated in the research process. The team extends their gratitude to all our members and informants, as well as the Social Movement Institute (Naysilla Rose) and Blok Politik Pelajar (Muzaffar in Jakarta and Munif in Semarang) who participated in the data collection process. This report also received valuable input from workshop rounds in Semarang, Lombok, and Lampung along with CSO stakeholders.

Ini yang kami sebut sebagai kontradiksi dalam gerakan masyarakat sipil Indonesia. Kami menggambarkan hambatan struktural bagi konsolidasi agenda demokrasi, yang tidak hanya menghasilkan keterbatasan, tetapi juga kesempatan.

Untuk mencapai tujuan ini, kami menggunakan metode campuran pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Pada pengumpulan data kualitatif, kami menganalisis 30 OMS dan mewawancarai 50 individu perwakilan organisasi selama periode Agustus hingga September 2024. Sementara untuk kuantitatif, dilakukan survei sederhana terhadap 135 responden muda yang terdaftar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota terpilih, yaitu Jakarta dan Semarang.

Pelibatan mereka sebagai representasi partisipan gelombang demonstrasi jalanan bertagar yang memprotes kemunduran demokrasi Indonesia sejak 2019. Studi ini juga memetakan regulasi yang terbentuk sejak kemunduran demokrasi Indonesia (setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir) untuk memahami konteks hukum yang memengaruhi ruang gerak OMS.

Temuan Utama: Kontradiksi dalam Gerakan Masyarakat Sipil

1. OMS Indonesia sangatlah beragam, namun secara legal-formal dapat dikelompokkan menjadi dua: OMS institutional (berstruktur formal, hierarkis, dan memiliki kegiatan programatis) dan OMS non-institutional atau organik (berstruktur informal-jaringan, kegiatan utamanya mengorganisasi gerakan tapak secara situasional).
 - a. Pertama, OMS dalam dua kategori ini memiliki logika politik dan sasaran yang berbeda dalam karya dan kerja mereka, meskipun terdapat tumpang tindih dalam cara mereka beroperasi.

This is what we mean by contradictions within the Indonesian civil society movement. We look at structural barriers for the consolidation of a democratic agenda, which brings not only constraints but also opportunities.

To achieve its objective, this research uses a mixed qualitative and quantitative data collection method, analysing 30 CSOs and interviewing 50 individual organisational representatives between August and September 2024. We also conducted a simple survey of 135 young respondents enrolled in Vocational High Schools (SMK) in the selected cities of Jakarta and Semarang.

Their involvement represents a segment of civil society participants in hashtag-driven street demonstrations protesting the decline of democracy in Indonesia since 2019. This study also maps regulations formed after Indonesia's democratic decline (at least in the last 10 years) to understand this context in the legal environment and its influence on the operations of CSOs.

Key Findings: Contradictions within Civil Society Movements

1. Indonesian CSOs are very diverse, but legally-formally, they can be grouped into: institutional CSOs (formal structure, hierarchical, and having programmatic activities) and non-institutional or organic CSOs (informal/networked structure, mainly organising spontaneous grassroots movements).
 - a. First, CSOs in these two categories have different political logic and targets in their work and efforts, although there may be overlaps in how they operate.

- b. Kedua, mereka juga jarang berinteraksi satu sama lain.
 - c. Ketiga, OMS institusional cenderung memiliki derajat kedekatan dan keterlibatan tinggi dengan institusi formal dan politik, sedangkan OMS organik lebih terhubung dengan komunitas tapak.
2. Kontradiksi pengaruh OMS tercermin dalam dua dimensi berikut:
- a. Pertama, OMS yang beroperasi di sektor yang dikuasai elit ekonomi politik—seperti pertambangan, kelapa sawit, dan perubahan fungsi lahan—memiliki dampak amat terbatas dengan sumber daya fisik, mental, maupun finansial mendesak.
 - b. Di saat yang sama, OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit ekonomi politik—seperti isu orang muda, kesetaraan gender, dan disabilitas—justru menunjukkan peningkatan pengaruh.
 - c. Ketiga, kedua dimensi ini hadir di tengah menyempitnya ruang masyarakat sipil, diakibatkan oleh menurunnya pendanaan dari perjanjian multilateral, bilateral, maupun organisasi donor internasional untuk agenda demokrasi dan desentralisasi, serta menguatnya dominasi elit ekonomi politik.
3. Kontradiksi lain dalam gerakan masyarakat sipil termanifestasi dari terbentuknya ruang politik pro-demokrasi melalui media digital. Ruang politik baru ini berinteraksi bersama OMS non-institusional yang mengambil bentuk kolektif dan digerakkan oleh siswa, mahasiswa, dan orang muda kelahiran pascareformasi 1998 yang peduli pada isu-isu HAM—termasuk hak pekerja, hak perempuan (dan anti-pelecehan seksual), hak digital (dan literasi), serta isu lainnya.
- b. Second, they also rarely interact with each other.
 - c. Third, institutional CSOs have a high degree of proximity and involvement with formal and political institutions, while non institutional CSOs have a high degree of proximity and involvement with grassroots communities.
2. The contradiction of CSO influence can be seen in two dimensions:
- a. First, CSOs operating in sectors dominated by political and economic elites such as mining, palm oil, and land use changes have very limited impact with pressing physical, mental, and financial resources.
 - b. At the same time, CSOs operating in areas not controlled by political and economic elites, such as youth issues, gender equality and disability, have increased their influence.
 - c. Third, these two dimensions co-exist in an increasingly narrow civil society space, partly due to declining funding from multilateral, bilateral agreements and international donor organisations for democracy and decentralisation agendas, but also due the increasing dominance of political and economic elites.
3. Another form of contradiction within the civil society movement manifests in the formation of pro-democracy political spaces using digital media. These new political spaces interact with non-institutional CSOs, taking the form of collectives driven by students and young people born after 1998 who care about human rights issues, including workers’ rights, women’s and sexual rights (and anti sexual harassment), digital rights (and literacy) and many others.

PENDAHULUAN³

Lanskap masyarakat sipil Indonesia telah mengalami transformasi hebat pasca jatuhnya rezim otoritarian (1966-1998), yang disebabkan oleh krisis finansial Asia 1997-1998, meningkatnya kompetisi intra-elit, serta menguatnya gerakan sosial pro-demokrasi (Aspinall, 2005). Gerakan sosial masyarakat sipil pada periode awal demokrasi ini terdiri dari siswa, mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan intelektual. Memasuki awal 2000-an, Indonesia mengalami fase kebebasan baru yang ditandai dengan menjamurnya LSM, kelompok advokasi, dan gerakan akar rumput yang bekerja di bidang HAM, demokrasi, dan keadilan sosial (Setiawan & Tomsa, 2023). Kelompok-kelompok ini berhasil memperoleh dukungan bermakna dari berbagai organisasi negara mitra dan donor internasional yang berupaya mempromosikan reformasi birokrasi dan penguatan institusi demokrasi. Definisi OMS kemudian kami susun dengan mempertimbangkan konteks sejarah ini.

Oleh karena itu, kami merasa perlu mengapresiasi kekuatan politik—yang bersifat institusional maupun organik—dalam mendukung agenda demokrasi, serta meninjau kembali perannya di tengah kemunduran demokrasi. Sehingga bagi kami, OMS: a. meliputi aktor dan organisasi non-negara yang beroperasi di ranah non-negara; b. didorong oleh tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah dengan melakukan teknik *lobbying* dan tekanan publik; c. terdiri atas OMS institusional (LSM) dan organik/non-institusional (gerakan sosial tapak); dan d. tidak mencakup OMS yang anti-demokrasi (Weiss & Hansson 2023, Norren-Nilsson, Savirani & Uhlin 2023).

Boks 1. Definisi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil merujuk pada aktor dan organisasi, baik lembaga institusional maupun jaringan organik, yang mendukung agenda demokrasi dan beroperasi di arena non-negara. Melalui berbagai upaya, mereka berusaha memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah.

Namun, operasi OMS di Indonesia dalam dekade pertama reformasi diwarnai oleh cara pandang, tatanan, dan nilai-nilai tata kelola tertentu yang memfasilitasi peningkatan peran OMS dengan meminimalkan peran negara dalam melayani warga negaranya, serta mempromosikan kinerja institusi publik berdasarkan logika efisiensi pasar—sering disebut sebagai prinsip-prinsip neoliberalisme (Ganti, 2014). Bagi kami, beragam nilai tersebut bertentangan dengan kerangka konstitusi Indonesia yang menjamin pelayanan dasar bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan. Dalam logika neoliberal, OMS cenderung melakukan pekerjaan untuk pemerintah yang mendistraksi CSO dari pengawalan agenda demokrasi berbasis sosial yang kuat (Caroll, 2009; Törnquist, 2009).

Pendanaan substansial dari donor internasional, misalnya Bank Dunia (Caroll & Jarvis, 2005), mendorong OMS di negara bagian Selatan untuk belajar budaya audit, termasuk praktik administrasi dan keuangan. Namun keterbatasan sumber daya telah menyita waktu dan tenaga dari banyak OMS, yang bisa digunakan untuk pengorganisasian komunitas tapak yang mereka wakili. Proses ini telah berlangsung lama. Sejak awal 2000-an, aktivis Indonesia mulai menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara tematik dan berbasis program, sesuai kerangka waktu pemberi dana (teknikalisasi), mencakup isu akuntabilitas pemerintah, pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun penting secara hukum, kegiatan semacam itu kerap tanpa agenda politik antar-OMS yang kohesif (depolitisasi).

³ Untuk memahami dengan tepat pembentukan sejarah pada masyarakat sipil kontemporer, kita perlu kembali ke tahun 1970-an, ketika masyarakat sipil memainkan peran penting dalam kejatuhan rezim otoriter di Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur. Masyarakat sipil, dengan demikian semakin diidealisasi sebagai bahan yang diperlukan untuk membangun dan memperbarui politik demokratis (Rodan, 2022). Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 memberikan dorongan lebih lanjut bagi kebangkitan intelektual masyarakat sipil. Perjuangan ideologis dan geopolitik selama Perang Dingin terus membentuk kontradiksi dalam aktivisme masyarakat sipil Asia Tenggara saat ini. Kontradiksi tersebut terwujud dalam potensi dan batasan upaya untuk memperkuat masyarakat sipil pro-demokrasi yang lebih koheren.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab empat pertanyaan kunci, sekaligus menjadi dasar pengorganisasian laporan riset ini.

Boks 2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi OMS Indonesia di era kemunduran demokrasi?
2. Bagaimana teknikalisisasi dan depolitisasi OMS Indonesia mempengaruhi kapasitas organisasi mendorong agenda demokrasi dan hubungan mereka dengan komunitas tapak?
3. Bagaimana peran gerakan lokal dalam lanskap OMS?
4. Bagaimana gerakan tapak orang muda berperan dalam lanskap OMS?

Konteks Sejarah

Pada awalnya, reformasi politik pascareformasi 1998 menyediakan lahan subur bagi perkembangan masyarakat sipil pro-demokrasi. Selama periode 1998-2000 saja, jumlah LSM tumbuh hingga sekitar 70,000, termasuk organisasi lingkungan dan kelompok hak perempuan (Beittinger-Lee, 2009), yang berkontribusi pada keberhasilan reformasi demokratis pada 2000-an, seperti perlindungan hak pekerja (Caraway & Ford, 2019) dan upaya pemberantasan korupsi (Schütte, 2008).

Namun sejak 2015, Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokratis (Hadiz, 2017; Mietzner, 2024; Savirani & Törnquist, 2015), yang turut memengaruhi dinamika masyarakat sipil. Kemunduran ini mencerminkan kondisi lebih luas yang dialami masyarakat sipil Asia (Lorch, 2022), bersamaan dengan menguatnya populisme sayap kanan di Amerika Serikat (AS) dan Perancis, serta India dan Filipina (Rodan, 2022). Di berbagai negara tersebut, penyempitan ruang sipil terjadi seiring menguatnya elit politik ekonomi baru yang mengusung janji populis untuk menjawab berbagai permasalahan struktural. Sejumlah kajian mutakhir telah membahas bagaimana masyarakat sipil bukan lagi sebagai entitas yang monolitik, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen dalam pembentukan elit baru yang menjadi bagian dari struktur negara (Rodan, 2022), terutama jika melihat banyaknya aktor masyarakat sipil yang mendukung kepemimpinan populis ini.

Boks 3. Kemunduran Demokrasi Abad-21

Kemunduran demokrasi bukan fenomena yang unik di Indonesia. Melihat kondisi AS dan Perancis, populisme sayap kanan menguat, sementara nasionalisme agama di India memperoleh popularitas melalui media sosial. Sementara di Indonesia dan Filipina, elit ekonomi politik otoritarian kembali berkuasa melalui dinasti politik di era demokrasi.

Kemunduran demokrasi secara global juga turut dipengaruhi oleh melemahnya representasi politik berbasis kelas, khususnya yang terkait dengan konsolidasi gerakan sosial demokratis di Eropa Barat (Mouffe, 1983; Weakliem & Adams, 2011). Salah satu dampaknya adalah maraknya politik identitas di berbagai negara demokratis di Utara Global, yang diperkuat oleh narasi pembelaan identitas, melalui media sosial. Di saat yang sama, agenda politik redistribusi yang ditujukan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melemah (Bornschier & Kriesi, 2011).

Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, industrialisasi cepat dan dinamika geopolitik Perang Dingin, pada periode 1960-an, mendorong represi negara yang secara efektif membongkar organisasi berbasis kelas yang independen (Rodan, 2022). Di Indonesia, dasar dari kemenangan rezim otoriter Orde Baru ditopang oleh pemusnahan fisik terhadap kaum kiri dan penindasan gerakan-gerakan populer (Robet 2008: 35, Hadiz 1999).

Boks 4. Melemahnya Politik Kelas di Utara dan Selatan-Global

Di berbagai negara di dunia, tercerai berainya politik kelas dan melemahnya agenda redistribusi sumber daya secara inklusif, berkontribusi pada menjamurnya politik identitas yang mempolarisasi basis pemilih demokratis. Kondisi ini menguntungkan elit politik ekonomi yang piawai memanfaatkan narasi populisme sayap kanan.

Pada periode 1980 dan 1990-an, terjadi penguatan harapan terhadap demokrasi seiring dengan ekspansi masyarakat sipil di Asia Tenggara. Optimisme semacam ini tercermin dalam tesis 'akhir sejarah' karya Fukuyama dan 'Gelombang Ketiga' demokratisasi karya Huntington. Organisasi internasional dan multilateral, termasuk Bank Dunia menjadikan pembangunan kapasitas masyarakat sipil sebagai bagian integral dari strategi bantuan luar negeri (Carothers, 2004; Carroll, 2010).

Namun demikian, lebih dari dua dekade setelah berakhirnya Orde Baru, warisan otoritarianisme tersebut tetap memengaruhi masyarakat sipil Indonesia dalam beberapa area, di antara lain:

- Pembubaran struktur otoriter pascareformasi 1998 menyebabkan penyebaran kekuatan politik yang sebelumnya bersatu. Aliansi dalam OMS menjadi terfragmentasi dan terserap ke dalam institusi demokratis baru (Robet 2008: 12).
- Organ-organ bantu negara, yang muncul pascareformasi 1998, secara khusus menyerap para aktor sosial yang sebelumnya berseberangan dengan negara otoriter. Dalam rekonfigurasi kekuasaan ini, berbagai organ bantu negara dan OMS menjadi arena perjuangan baru (Robet, 2008, p. 20).
- Penurunan politik kelas berimbas pada ketiadaan proyek politik bersama yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan pekerja, menghubungkan OMS dengan basis massa akar rumput, dan mengatasi masalah fragmentasi.
- Dukungan kelembagaan dan finansial bagi OMS yang mempromosikan nilai-nilai liberal memungkinkan beberapa OMS berkembang, khususnya di bidang HAM (Robet, 2008, pp. 39-41). Namun, banyak OMS menghadapi kesulitan dalam melakukan mobilisasi dan konsolidasi akar rumput—terutama ketika harus berhadapan dengan negara (Harney & Olivia, 2003: 18-21).⁴
- Skema pendanaan pascaotoriter mendorong OMS membangun kemitraan dengan institusi negara. Ini mereproduksi logika korporatisme negara (Robet, 2008: 6) yang memfasilitasi kooptasi OMS oleh negara seperti di era Orde Baru.

Fokus yang berlebihan pada OMS profesional dan teknokratis cenderung mengaburkan isu-isu struktural, seperti ketidaksetaraan, keadilan sosial, atau imperialisme—terutama dalam konteks di mana politik kelas telah dihilangkan (Carroll & Jarvis, 2015). Kondisi ini semakin melemahkan kapasitas OMS dalam mengkonsolidasikan kekuatan basis massa akar rumput.

Dengan pemahaman tersebut, kerangka penelitian ini dikembangkan untuk memahami proses teknikalisis dan depolitisasi dalam OMS, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi kemampuan mereka dalam mempromosikan nilai-nilai demokratis dan membangun koneksi yang kuat dengan konstituen akar rumput di tengah konteks politik kontemporer Indonesia.

⁴ Harney dan Olivia (2003, hal. 10) mencatat bagaimana para aktivis di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berupaya untuk tidak sekedar menjadi lembaga advokasi, dengan membuka kantor-kantor hukum mereka untuk segala bentuk pengorganisasian. Alih-alih hanya mengadvokasi universalitas hukum, YLBHI berkonsentrasi pada kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk hukum di pemerintahan, universitas, kontrak kerja, dan pengadilan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), koalisi aktivis lingkungan di Indonesia, juga termotivasi untuk bergerak menjauh dari model advokasi dan keahlian menuju bentuk organisasi massa (Harney dan Olivia 2003). YLBHI dan WALHI menunjukkan tanda-tanda menginginkan revolusi dalam masyarakat sipil Indonesia.

Boks 5. Warisan Orde Baru dalam Masyarakat Sipil Indonesia.

- **Fragmentasi:** Aliansi pro-demokrasi terpecah dan terserap ke dalam partai politik dan lembaga negara.
- **Aktivis menjadi bagian sistem:** Para penentang rezim otoriter masuk ke dalam struktur pemerintah demokratis.
- **Inkoherensi tujuan:** Ketiadaan politik berbasis kelas, berimbas pada terhambatnya agenda kolektif yang menyatukan OMS dengan basis massa akar rumput/tapak.
- **Kesulitan membangun gerakan massa:** Hubungan OMS dengan basis sosial melemah, sehingga berdampak pada kesulitan mobilisasi, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan negara dan elit.
- **Struktur korporatis:** Skema pendanaan mendorong kemitraan OMS dengan negara. Hal ini justru menciptakan pola kontrol yang menyerupai praktik era Orde Baru.
- **Polarisasi politik identitas:** Melemahnya politik kelas membuka ruang bagi politik identitas, yang memecah basis pemilik demokratis di berbagai negara dan melemahkan agenda redistribusi sumber daya untuk semua orang tanpa terkecuali. Kondisi ini menguntungkan elit politik ekonomi melalui populisme sayap kanan.

KERANGKA BERPIKIR

Bagian ini menjelaskan konsep kunci yang menjadi landasan analisis untuk memahami OMS Indonesia di era kemunduran demokrasi. Kerangka berpikir ini menghubungkan konteks sejarah dengan dua konsep utama: teknikalisisasi dan depolitisasi. Bagian ini juga memberikan penjelasan mengenai metode riset yang digunakan.

Konsep Utama

Melanjutkan konteks historis, kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman konseptual tentang teknikalisisasi dan depolitisasi dalam gerakan masyarakat sipil Indonesia. Teknikalisisasi mengacu pada praktik pengelolaan OMS melalui pendekatan teknokratis, yang sarat dengan kontradiksi (Kooy & Bakker, 2008; Li, 2007). Sedangkan teknokratisasi merupakan bentuk pemerintahan yang terampil (*techne-kratia*), yang berakar pada rasionalitas dan logika (Gilley 2017, hal. 11).

Teknokrasi tidak selalu bernilai negatif. Dalam penelitian ini, keterampilan, rasionalitas, dan logika hukum—tercermin dari kinerja birokrat pemerintahan dan non-pemerintahan—dipandang perlu sepanjang berdialektika dengan OMS yang memiliki *good sense* dalam mewakili kepentingan politik masyarakat tapak. Tanpa kesadaran atas pembagian peran dan konteks historis-material, teknikalitas OMS justru berjalan dengan mengikuti logika tata kelola neoliberal. Dalam hal ini, pendekatan *common sense* yang apolitis dalam pembangunan ekonomi hingga manajemen konflik (Thurston, 2018, hal. 218) dianggap lebih normal dibanding tuntutan akan keadilan.

Dalam hal ini, kami mempersoalkan teknikalisisasi sebagai proses di mana kinerja OMS difokuskan semata-mata pada keahlian teknis, efisiensi, dan manajemen terstandar (Kooy & Bakker, 2008; Li, 2007), yang dalam prosesnya membentuk apolitisme. Hal ini tercermin dalam praktik keseharian OMS yang mengutamakan profesionalisme manajerial, program berbasis hasil terukur, pelaporan dan akuntabilitas formal, dan indikator kinerja kuantitatif (Gilley, 2017: 11), ketimbang berkumpul bersama basis sosialnya secara reguler (atau malah tidak memiliki hubungan dengan basis sosial). Teknikalisisasi juga cenderung mengarah kepada apolitisme, ketika fokus utama OMS ada pada efisiensi dan pencapaian hasil untuk menghindari risiko kerentanan pendanaan. Rasionalisasi ini

mengaburkan relasi kekuasaan yang perlu dibongkar—baik antara donor dan OMS, maupun antara OMS dan basis sosialnya—sebelum menjalankan program ke komunitas tapak. Proses ini menjauhkan OMS dari agenda politik transformatif dan pengorganisasian akar rumput.

Boks 6. Konsep Utama

Penelitian ini berfokus pada dua konsep utama: teknikalisisasi dan depolitisasi dalam OMS.

- **Teknikalisasi:** Proses sehari-hari yang menekankan efisiensi dan standardisasi dalam pengelolaan program OMS, yang secara sosial mengubah gerakan politik menjadi manajemen profesional.
- **Depolitisasi:** Proses pelemahan dimensi politik dalam kegiatan OMS, ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik dan meluasnya polarisasi yang memecah agenda politik kolektif.

Adapun depolitisasi dalam konteks OMS didefinisikan sebagai erosi bertahap atas deliberasi sosial mengenai isu-isu politik, hingga pilihan-pilihan tentang isu tersebut tidak lagi diperdebatkan secara publik (Wood & Flinders, 2015, hal. 30). Proses ini berkaitan dengan kekhawatiran Tocquevillian mengenai pembinaan kewarganegaraan yang aktif dan partisipatif, sekaligus mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong ketidakterlibatan politik. Datzberger (2015, hal. 1596) berargumen bahwa dalam ruang sipil yang terdepolitisasi, “aktor-aktor rentan kerap diinstrumentalisasi oleh negara atau pihak eksternal untuk melayani agenda politik pemerintah”. Gallo (2021, hal. 558) menegaskan bahwa “depolitisasi adalah kelanjutan dari politik (neoliberal) dengan cara lain.” Pandangan tersebut menggarisbawahi bagaimana depolitisasi menjadi elemen kunci dari logika neoliberal.

Dengan demikian, depolitisasi OMS dalam penelitian ini merujuk pada proses pelemahan bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas organisasi, yang turut mempersempit ruang deliberasi publik atas isu-isu kritis. Hal ini ditandai oleh berkurangnya diskusi mengenai relasi kuasa dalam masyarakat—beberapa isu boleh dibicarakan selama tidak mengganggu tatanan elit ekonomi politik—serta fokus berlebihan dalam menjawab persoalan programatik. Selain itu, depolitisasi juga berdampak pada tercerainya agenda perubahan sosial dan melemahnya konsolidasi gerakan lintas kelas dan sektor (Wood & Flinders, 2015). Dalam kondisi ini, pilihan politik tidak lagi diperdebatkan secara terbuka, kecuali dalam bentuk polarisasi, yang akhirnya mengurangi peran masyarakat sipil dalam membentuk kesadaran kritis.

Kerangka berpikir ini membantu menjelaskan mengapa—meskipun kapasitas teknis dan manajerial OMS di Indonesia meningkat (Thurston, 2018, hal. 217)—kemampuan mereka untuk mendorong agenda demokratisasi yang transformatif justru melemah. Analisis ini juga menyoroti kontradiksi yang muncul dimana telah terjadi peningkatan profesionalisme OMS (Gallo 2021, hal. 558), namun di sisi lain OMS mengalami kesulitan dalam konsolidasi gerakan, serta membangun hubungan yang kuat dengan basis massa (Ramcilovic-Suominen, 2024).

Metode

Untuk menyelidiki dinamika tersebut dalam konteks Indonesia kontemporer, penelitian ini mengadopsi strategi metode campuran (Creswell & Creswell, 2017) yang mengintegrasikan pengumpulan data kualitatif (wawancara semi-terstruktur) dan kuantitatif (survei dasar), serta studi pustaka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 40 individu dari 30 OMS, yang dilakukan secara daring melalui Zoom dan tatap muka di beberapa kota besar, antara Agustus hingga September 2024.

Selain itu, survei daring dilakukan terhadap 135 siswa dan alumni SMK di Jakarta dan Semarang, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap 15 siswa dan alumni. Survei daring dilakukan untuk memetakan potensi kaum muda dalam berkontribusi membentuk arah demokrasi Indonesia. Sementara data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur komprehensif mengenai sejarah OMS Indonesia sejak 1970 hingga 2024, serta analisis dokumen kebijakan negara terkait masyarakat sipil, profil, dan kinerja OMS yang tersedia melalui *platform* digital mereka.

Mengikuti tradisi penelitian aksi partisipatif (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2013), penelitian ini tidak hanya bertujuan menganalisis, tetapi juga mendukung aktor OMS dalam merefleksikan situasi mereka dan merumuskan strategi konsolidasi. Pendekatan ini diimplementasikan melalui diseminasi temuan awal kepada partisipan, khususnya aktor OMS pro-demokrasi. Masukan mereka memperkuat analisis dalam laporan ini.

Dengan mengutamakan pemahaman atas perspektif dan praktik beragam aktor OMS secara organik, penelitian ini mengkontekstualisasikan pengalaman subjektif mereka dalam kerangka historis neoliberalisasi yang lebih luas. Pada saat yang sama, penelitian ini mengakui kontradiksi inheren dalam upaya memperkuat masyarakat sipil pro-demokrasi yang lebih koheren di tengah era kemunduran demokrasi (Setiawan & Tomsa, 2023; Hadiz, 2017; Mietzner, 2024).

TEMUAN UTAMA

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian dengan menerapkan dua konsep kunci, yaitu teknikalisis dan depolitisasi, untuk meneliti bagaimana OMS Indonesia beradaptasi dan menegosiasikan prinsip-prinsip neoliberal dalam pengelolaan kehidupan sipil. Analisis difokuskan pada bagaimana OMS menavigasi cita-cita demokratis, sebagaimana tercermin dalam praktik advokasi mereka dan tuntutan manajerialisme teknis yang semakin meningkat. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan pengalaman historis dan keseharian OMS Indonesia dalam merespons kontradiksi neoliberal melalui empat dimensi utama: di antaranya kontradiksi dalam lingkungan regulasi, paradoks profesionalisasi, otonomi lokal yang relatif, dan rizoma gerakan orang muda.

Kontradiksi dalam Lingkungan Regulasi

Bagian ini menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai kondisi OMS di era kemunduran demokrasi. Berdasarkan analisis historis terhadap OMS pasca-otoritarian di Indonesia, ditemukan bahwa institusi negara, melalui berbagai aturan dan regulasi, telah memengaruhi ruang gerak masyarakat sipil. Meskipun UUD 1945 Pasal 28(2) menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat sebagai prinsip demokratis, hak-hak konstitusional tersebut mengalami penurunan kualitas dalam dekade terakhir, sebagaimana tercermin dalam regulasi yang mempersempit ruang sipil (Warburton & Aspinall, 2019).

Studi pemetaan regulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa lingkungan hukum bagi OMS di Indonesia bersifat kontradiktif. Di satu sisi, terdapat regulasi yang mendukung aktivitas masyarakat sipil, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak asasi manusia. Dua regulasi ini selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi HAM dan menjadi landasan formal praktik HAM di Indonesia.

Namun di sisi lain, beberapa regulasi justru bertentangan dengan perlindungan konstitusional tersebut. Misalnya, UU No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang memberikan kekuasaan sepihak kepada negara untuk membubarkan organisasi yang dianggap pemerintah melanggar ideologi Pancasila tanpa peninjauan yudisial. Selain itu, UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Publik dan UU No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga memperkuat pembatasan terhadap ruang sipil—dengan dalih pencemaran nama baik pemimpin negara.

Menurut data SAFEnet (2024), terdapat 379 kasus kriminalisasi digital berbasis UU ITE, dengan 126 kasus terjadi pada 2023. Mereka juga mencatat 965 insiden serangan digital di Indonesia antara 2020 dan 2023, dengan 323 kasus pada tahun 2023 saja (SAFEnet, 2024). Hal yang patut dicermati, **pembatasan ini telah melampaui ruang digital dan memengaruhi aktivitas masyarakat sipil secara lebih luas.** Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum menjelaskan bahwa ancaman kini tidak terbatas pada dunia digital, akun pesan instan pun dapat diambil alih dan digunakan untuk menyebarkan hasutan yang kemudian berujung pada penangkapan oleh polisi (wawancara, 28 November 2024).

Masalah kedua berkaitan dengan inkonsistensi dalam implementasi regulasi. Sistem hukum Indonesia terdiri dari legislasi nasional (undang-undang) dan regulasi turunan di berbagai tingkat, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Keputusan Menteri (Kepmen). **Dalam lapisan aturan ini, ditemukan sejumlah regulasi pelaksana yang tidak sejalan dengan undang-undang induk,** seperti PP No.59 Tahun 2016 tentang Pendirian Organisasi Sosial oleh Orang Asing; Perpres No.18 Tahun 2017 tentang Kode Etik Donasi OMS dalam Penanggulangan Terorisme; dan Kepmendagri No. 38 Tahun 2008 tentang Donasi Asing untuk Organisasi Masyarakat. **Beragam regulasi ini memberikan kendali besar kepada negara atas OMS, terutama yang memiliki koneksi internasional.** Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Scheppele (2018) sebagai *legalisme otokratis*, yaitu metode di mana rezim penguasa dalam sistem politik demokrasi mengkonsolidasikan dan mempertahankan kekuasaannya melalui mekanisme legal.

Menariknya, di tengah kecenderungan represif tersebut, **negara juga memproduksi regulasi yang mendukung berbagai isu yang menjadi agenda masyarakat sipil.** Contohnya adalah UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Hak Penyandang Disabilitas, yang menunjukkan keterbukaan rezim penguasa secara selektif, terutama pada isu yang dianggap kurang mengancam, serta selaras dengan kepentingan politik dan bisnis mereka.

Adapun isu yang dianggap lebih mengancam, seperti hak atas tanah, perlindungan lingkungan, dan hak adat justru seringkali diabaikan atau dibatasi. Kasus hak atas tanah menguatkan argumen ini. Meskipun masih menjadi perdebatan apakah Reforma Agraria menguntungkan masyarakat lokal, pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi membuka peluang untuk jaminan perumahan, setidaknya di Jakarta (Batubara et al., 2024). Namun, kemajuan ini sangat bergantung pada dukungan gubernur, dan berpotensi mengalami perubahan pascapemilu (Afiff & Rachman, 2019).

Oleh karena itu, analisis di atas menunjukkan bagaimana rezim secara strategis menciptakan fragmentasi di antara OMS, melalui perlakuan yang berbeda terhadap isu-isu yang mereka advokasi. Pendekatan selektif tersebut juga memperdalam perpecahan dalam masyarakat sipil—sebuah kondisi yang kami identifikasi sebagai “fragmentasi OMS yang disponsori negara”. **Kondisi tersebut yang kemudian menjadi tantangan signifikan bagi OMS Indonesia, terutama di tengah menurunnya dukungan donor dalam beberapa dekade terakhir, serta semakin membatasi kemampuan mereka untuk bertahan dan beroperasi secara efektif.**

Boks 7. Temuan 1: Lingkungan Regulasi yang Kontradiktif

Kondisi OMS di era kemunduran demokrasi ditandai oleh:

1. **Dualisme regulasi:** Perangkat peraturan yang mendukung dan menghambat ruang gerak sipil.
2. **Kriminalisasi digital:** Meningkatkan jumlah kasus persekusi berbasis daring, dan mekanisme baru dalam penyebaran hasutan.
3. **Implementasi selektif:** Kontrol negara menguat atas OMS, khususnya yang memiliki koneksi internasional.

Paradoks Profesionalisasi

Bagian ini membahas bagaimana proses teknikalisisasi dan depolitisasi OMS Indonesia memengaruhi kapasitas organisasi dalam mendorong agenda demokrasi dan membangun hubungan dengan komunitas tapak. **Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teknikalisisasi menciptakan paradoks dalam gerakan masyarakat sipil Indonesia. Di satu sisi, teknikalisisasi meningkatkan profesionalisme dan kapasitas teknis OMS. Namun di sisi lain, hal tersebut juga mengikis kemampuan OMS untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik progresif.** Hal ini menghasilkan dampak yang bervariasi pada OMS, tergantung pada bentuk dan karakter kelembagaan masing-masing organisasinya.

Tabel 1. Tipe-Tipe OMS

Karakteristik	OMS Institusional	OMS Non-Institusional/ Organik
Area fokus	<ul style="list-style-type: none">• Isu makro-struktural (tanah dan lingkungan)• Isu mikro-HAM (perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat)	<ul style="list-style-type: none">• Advokasi berbasis komunitas• Gerakan sosial lokal
Ciri organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Lembaga formal• Program reguler• Staf tetap• Aset fisik (gedung)• Jaringan mapan	<ul style="list-style-type: none">• Struktur formal• Pengorganisasian sporadis• Berbasis sukarela• Aset fisik terbatas• Jaringan lokal dan regional
Sumber dana	<ul style="list-style-type: none">• Donor internasional• Agen pembangunan• Siklus pendanaan reguler	<ul style="list-style-type: none">• Sumbangan komunitas• Pendanaan ad-hoc• Kurang sumber daya
Sifat	<ul style="list-style-type: none">• Derajat teknikalisisasi tinggi• Laporan terstruktur• Kegiatan programatik• Manajemen profesional	<ul style="list-style-type: none">• Orientasi politik jelas• Organisasi fleksibel• Kepemimpinan komunitas/lokal

Fokus pada implementasi program-program spesifik telah membatasi ruang bagi OMS terlembaga untuk membangun jaringan mereka, baik antar organisasi, maupun dengan komunitas akar rumput. Budhis dari Kapal Perempuan mengungkapkan bahwa kesibukan mengelola berbagai program menyulitkan koordinasi dengan OMS lain (wawancara, 10 September 2024). Beberapa inisiatif konsolidasi telah muncul, salah satunya melalui Pertemuan Nasional (Munas) dengan Kapal Perempuan mengenai isu perempuan, didukung oleh Program INKLUSI dari DFAT. Hasil dokumentasi dan perumusannya kemudian diteruskan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan dimasukkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Nasional (Renstra).

Upaya konsolidasi yang lebih luas terlihat pada pembentukan Forum Masyarakat Sipil Indonesia (ICSF) pada 2018, diprakarsai oleh Yappika, Habibie Institute dan Amnesty International, dengan dukungan dari lembaga donor internasional—seperti USAID, Ford Foundation, DFAT, dan GIZ. Hingga 2024, Yappika memainkan peran organisasional kunci dalam organisasi ICSF. Menurut Riza Imaduddin Abdali dari Yappika ActionAid, ICSF merupakan salah satu pilar ekosistem OMS, yang berfungsi sebagai ruang diskusi dan refleksi atas tantangan, pengembangan inisiatif baru, serta pengenalan pendekatan dan strategi yang berdampak (wawancara, 9 Oktober 2024).

Pada 2024, ICSF memperluas jangkauannya dengan menyelenggarakan forum regional di Medan, Yogyakarta, dan Makassar sebelum pertemuan nasional. Fokus utama forum tersebut adalah keberlanjutan OMS, seiring menurunnya dukungan donor asing dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 300 OMS berpartisipasi dalam diskusi mengenai peran mereka dalam merespon kemunduran demokrasi Indonesia dan meningkatnya otoritarianisme, terutama terkait UU ITE dan regulasi Ormas (Riza Imaduddin Abdali, Yappika/ICSF, wawancara, October 9, 2024).

Selain ICSF, terdapat inisiatif berbentuk koalisi yang lebih longgar, seperti Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)—pada tahun 2024 melibatkan lima organisasi utama—yaitu Yappika, PSHK, Imparsial, ELSAM, dan LBH Jakarta, serta 30 anggota lainnya. DFAT turut secara aktif mendorong kolaborasi antar-OMS sebagai bagian dari strategi sinergi lintas lembaga (Abdi Suryaningati, INKLUSI, 17 September 2025). Namun, dinamika konsolidasi ini masih bersifat musiman dan belum menjadi praktik yang berkelanjutan.

Dalam dekade terakhir, OMS Indonesia juga semakin fokus pada peningkatan kapabilitas teknis dan manajerial, terutama dalam mengembangkan keterampilan manajemen administratif, keuangan tingkat tinggi, serta pemanfaatan teknologi. Aktivis OMS kini kian mahir dalam dokumentasi manajemen program, penulisan proposal, penyusunan kerangka logis, sistem pemantauan, evaluasi dampak, dan teknik evaluasi lainnya. **Proses teknikalisis ini menjadikan OMS lebih profesional, dengan manajerialisme sebagai inti pendekatannya. Hasilnya, keberhasilan program OMS cenderung diukur secara kuantitatif dan teknis—sangat berbeda dari respons politik reaktif yang menjadi ciri khas OMS pascareformasi akhir 1990-an.**

Perkembangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan kritis lanjutan: “apakah profesionalisme teknis tersebut membantu memperkuat kapasitas OMS dalam menjaga kualitas demokrasi?” Sebab peningkatan kecanggihan manajerial di kalangan OMS justru terjadi bersamaan dengan kembalinya para pelanggar HAM masa lalu ke ruang politik, sebuah kontradiksi yang perlu dikaji dengan kerangka analisis teknikalisis dan depolitisasi dalam penelitian ini.

OMS terlembaga mengalami teknikalisis melalui peningkatan manajerialisme. Meskipun bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, banyak OMS justru terjebak dalam siklus pelaporan teknis yang tak berujung. Persyaratan ini, yang telah dikuasai keahliannya oleh beberapa OMS, terutama berasal dari tuntutan akuntabilitas donor.

Karakteristik pelaporan tersebut bervariasi tergantung jenis donor: yayasan swasta seperti Ford Foundation atau Gates Foundation, yang biasanya memiliki pendekatan berbeda dibanding lembaga kerjasama pembangunan *government-to-government* (G-to-G), seperti DFAT, Uni Eropa, GIZ, dan USAID. Skema G-to-G sering menuntut dokumentasi rinci dari awal hingga akhir proyek, dengan pelaporan berkala yang ekstensif (Laili Khainur, Direktur Gemawan, wawancara, September 6, 2024; Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Pikul, wawancara, September 6, 2024). Hal ini seringkali mengurangi kebebasan OMS dalam menggunakan dana yang mereka terima. **Orientasi pada akuntabilitas turut membentuk budaya organisasi gerakan menjadi semakin fokus pada hasil program dan implementasi proyek, alih-alih pada konsolidasi gerakan** (Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Pikul, wawancara, 6 September 2024).

Oleh karena itu, OMS menghadapi ketegangan signifikan antara tuntutan manajerial dan dorongan untuk bertindak progresif. Direktur Eksekutif Gemawan, Laili Khainur mengungkapkan bahwa program mereka juga berhubungan dengan gerakan sosial (Wawancara, 6 September 2024), salah satunya melalui pemanfaatan *drone* dan GIS pemetaan partisipatif pemantauan kebakaran hutan (Lili Khainur, wawancara, 6 September 2024). Upaya tersebut memungkinkan kolaborasi antardesa dan penduduknya ada dalam pemantauan dan penanganan kebakaran. **Namun, teknikalisisasi juga membatasi ruang OMS untuk memulai program progresif yang menghasilkan transformasi sosial, seperti konsolidasi akar rumput dan kerja sama antar OMS lokal dengan yang berbasis di Jakarta.** Keterbatasan ini menggambarkan bagaimana teknikalisisasi dapat mengarah pada depolitisasi, di mana kegiatan yang berfokus pada transformasi sosial menjadi sulit dijalankan dalam kerangka programatik standar (Budhis Utami, Direktur Kapal Perempuan, wawancara, 10 September 2024).

Boks 8. Temuan 2: Paradoks Profesionalisme

Berbagai dampak teknikalisisasi dan depolitisasi OMS Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Ketegangan Akuntabilitas vs Transformasi:** Tuntutan manajerial dan pelaporan donor (terutama skema G-to-G) menghabiskan sumber daya OMS, membatasi kemampuan mereka untuk memfasilitasi transformasi sosial dan konsolidasi gerakan.
2. **Fragmentasi Organisasional:** OMS institusional terjebak dalam "silo program" yang membatasi koordinasi antar-OMS (apa lagi yang fokus kerjanya lintas sektor) dan dengan komunitas tapak.
3. **Kesenjangan Kapasitas Teknis vs Politik:** Sementara OMS mengembangkan keahlian teknis tinggi (penulisan proposal, kerangka logis, sistem pemantauan), kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun.
4. **Prioritas Donor Membatasi Agenda:** Pendanaan donor lebih menekankan isu seperti pengarusutamaan gender dan transparansi anggaran, sementara pendekatan pengorganisasian tapak kurang mendapat dukungan.
5. **Upaya Konsolidasi Terbatas:** Inisiatif seperti ICSF dan KKB mencoba menjembatani fragmentasi, tetapi masih bersifat musiman dan tergantung dukungan donor.

Direktur Elpagar, Fubertus Ipur turut menambahkan bahwa **sebagian besar donor tidak mendukung program berbasis pendidikan atau pendekatan partisipatif. Prioritas mereka lebih pada isu pengarusutamaan gender dan transparansi anggaran—yang dinilai jauh dari upaya pengorganisasian tapak dan pengembangan masyarakat sehari-hari** (Fubertus Ipur, wawancara, 22 September 2024). Meskipun energi OMS banyak terserap ke dalam teknikalitas dan urusan manajemen, mereka masih berusaha memanfaatkan ruang terbatas yang tersedia untuk menciptakan peluang politik.

Salah satu contoh upaya keberlanjutan adalah program *Build* dari Ford Foundation, yang memungkinkan Gemawan membangun kompleks kantor sebagai sumber pendapatan organisasi melalui sistem sewa. Salah satu ruang di kompleks tersebut juga digunakan oleh aktivis di Pontianak untuk mengkonsolidasikan gerakan mereka. Contoh lainnya adalah pemanfaatan GTRA di tingkat provinsi untuk mengadvokasi hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin kota di Jakarta. Namun, inisiatif-inisiatif ini bersifat sporadis dan bergantung pada isu tertentu, sehingga sulit untuk menilai dampaknya secara keseluruhan.

Otonomi Lokal yang Relatif

Setelah mengkaji OMS yang beroperasi di tingkat nasional dan berbasis di Jakarta, **penting untuk menyoroti dinamika lokal dalam lanskap masyarakat sipil Indonesia. OMS di tingkat lokal menghadapi konteks politik, tantangan, dan peluang yang berbeda, seiring dengan variasi relasi kekuasaan di daerah.** Secara umum, OMS lokal dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama: (a) cabang dari OMS di tingkat nasional, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta (b) organisasi independen yang didirikan secara lokal oleh aktivis setempat. Kelompok pertama cenderung membawa isu nasional dan manifestasinya di tingkat lokal, sementara kelompok kedua lebih fokus pada isu-isu yang sangat terlokalisasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa **OMS lokal yang terlembaga juga menghadapi tekanan teknikalisisasi dan depolitisasi, terutama ketika menerima pendanaan dari organisasi donor internasional atau cabang pusat mereka di Jakarta.** Salah satu contohnya adalah OMS lokal yang menerima dukungan dari program MADANI *Civil Society Support Initiative* dari USAID. Program ini mendukung OMS lokal di 32 kabupaten di Indonesia antara periode 2019-2024.

Program tersebut menyelenggarakan *Multi-Stakeholder Learning Forum* untuk memperkuat kapasitas advokasi OMS lokal dalam memengaruhi reformasi di sektor pembangunan (Madani, 2022). MADANI juga mendorong penggunaan skema “swakelola” sebagai sumber daya alternatif bagi OMS lokal di 32 lokasi MADANI untuk mengakses dan memobilisasi anggaran pemerintah daerah melalui skema *Swakelola* (Hans Antlöv, mantan MADANI USAID Chief of Party, wawancara, October 8, 2024).

Meskipun mencapai keberhasilan, Hans Antlöv mencatat **adanya keterbatasan dalam jenis advokasi yang dilakukan OMS lokal. Beberapa isu seperti hak kelompok LGBT dan Ahmadiyah dianggap sensitif di tingkat lokal. Situasi ini membatasi ruang gerak advokasi berbasis hak asasi manusia untuk isu-isu yang dianggap kontroversial dalam konteks lokal (Wawancara, October 8, 2024).**

Sementara itu, OMS non-institusional seperti Dewan Rakyat Lampung (DRL), yang didirikan dan dipimpin oleh mahasiswa yang memperjuangkan hak atas tanah petani, membatasi aktivisme dan jaringan mereka di wilayah Lampung. Strategi terlokalisasi seperti ini membatasi kekuatan mereka ketika harus berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PTPN (PT Perkebunan Nusantara), yang terlibat dalam konflik agraria lokal. DLR juga menolak dukungan finansial dari donor dan belum membangun jaringan di wilayah luar Lampung.

Dalam wawancara dengan DRL di Bandar Lampung pada 23 September 2024, salah satu anggota menyatakan, "kami telah belajar bahwa mendapatkan dukungan finansial dari donor hanya akan membuat gerakan kami kacau karena kami bertengkar tentang uang, bukan strategi" (anonim, 23 September 2024). Strategi ini mencerminkan kesadaran kritis atas risiko dukungan donor terhadap kohesi dan arah gerakan, sekaligus menggambarkan upaya menjaga otonomi politik dan ideologis mereka.

Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa OMS lokal yang berhadapan dengan industri ekstraktif menghadapi tantangan yang lebih besar. Di wilayah seperti Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, OMS lokal harus berhadapan dengan kombinasi kekuatan korporasi multinasional, BUMN, dan elit politik lokal yang memiliki kepentingan dalam industri pertambangan. **Akibatnya, konstelasi kekuasaan ini membatasi ruang gerak OMS dan meningkatkan risiko keamanan bagi aktivis lokal. Peran gerakan lokal dalam lanskap OMS Indonesia menunjukkan kompleksitas dan kontradiksi serupa dengan yang terjadi di tingkat nasional.**

Di satu sisi, program dukungan seperti MADANI telah memperkuat kapasitas teknis OMS lokal dalam melakukan advokasi. Namun di sisi lain, mereka tetap menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan pendanaan, isu sensitif yang sulit diangkat secara terbuka, serta konfrontasi dengan kepentingan ekonomi politik yang dominan di daerah.

Studi kasus DRL menunjukkan munculnya pendekatan alternatif, yaitu menekankan kemandirian dan otonomi dari sistem pendanaan donor. Strategi ini berpotensi mengatasi kontradiksi teknikalisisasi dan depolitisasi, yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, meskipun DRL juga menghadapi isu keterbatasan jangkauan. **Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa OMS lokal menghadapi kontradiksi yang serupa dengan OMS di tingkat nasional, dengan memilih antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan donor atau mempertahankan otonomi politik dengan konsekuensi terbatasnya sumber daya.**

Boks 9. Temuan 3: Otonomi Lokal yang Relatif

Berbagai gerakan lokal dalam lanskap OMS dapat ditandai dengan:

1. **Tipologi Ganda OMS Lokal:** Terdapat dua bentuk utama OMS lokal, yaitu a) cabang dari OMS nasional, seperti LBH dan WALHI yang menangani manifestasi lokal dari isu nasional dan b) organisasi independen yang didirikan oleh aktivis lokal dengan fokus pada isu-isu yang sangat terlokalisasi.
2. **Dualisme Pendanaan dan Kapasitas:** Program seperti MADANI (USAID) memperkuat kapasitas teknis OMS lokal dan membuka akses pendanaan alternatif melalui skema *Swakelola*, namun hal ini juga memiliki risiko teknikalisisasi dan depolitisasi.
3. **Keterbatasan Ruang Advokasi:** OMS lokal menghadapi pembatasan dalam topik advokasi, pada isu sensitif, seperti hak-hak kelompok LGBT dan Ahmadiyah, yang sulit diadvokasi di tingkat daerah.
4. **Model Alternatif Kemandirian:** DRL menawarkan contoh model alternatif dengan menolak pendanaan donor dan mempertahankan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan, terutama terhadap entitas besar seperti BUMN.
5. **Tantangan Ekstraktif:** OMS lokal yang berhadapan dengan industri ekstraktif, seperti di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, menghadapi tantangan berlapis dari korporasi multinasional, BUMN, dan elit politik lokal, dengan risiko keamanan yang lebih tinggi.

Rizoma Gerakan Orang Muda

Bagian ini membahas pertanyaan penelitian keempat mengenai peran gerakan tapak orang muda dalam lanskap OMS Indonesia. Analisis pada bagian ini menunjukkan bagaimana gerakan orang muda telah muncul sebagai kekuatan penting dalam ekosistem masyarakat sipil dengan pola mobilisasi, karakteristik organisasional, dan strategi aktivisme yang berbeda dari OMS institusional maupun organik.

Berdasarkan survei terhadap 135 siswa SMK di Jakarta dan Semarang, serta wawancara mendalam dengan 15 siswa dan alumni, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah karakteristik kunci:

1. Berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional, **gerakan orang muda cenderung menerapkan model organisasi yang lebih horizontal, cair, dan berjejaring**—dikenal sebagai model *rizomatik* (Sastramidjaja, 2019; 2023). Struktur ini memungkinkan mobilisasi cepat, pertukaran informasi yang fleksibel, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
2. **Teknologi digital menjadi tulang punggung gerakan orang muda** di mana media sosial menjadi sarana utama untuk koordinasi, pertukaran informasi, dan mobilisasi. Hasil survei digital, misalnya, menunjukkan bahwa sekitar 87% responden survei menyatakan pertama kali terlibat dalam aktivisme melalui *platform* digital (Survei SMK, September 2024).
3. **Gerakan orang muda mencakup spektrum isu yang luas**, mulai dari kesetaraan gender, hak digital, keadilan iklim, anti-pelecehan seksual, hingga hak pekerja, termasuk kritik terhadap UU Cipta Kerja. Ini mencerminkan perluasan kesadaran politik generasi pascareformasi.
4. Berbeda dari OMS institusional yang bergantung pada donor, **banyak gerakan orang muda mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding**. Sehingga, memungkinkan mereka untuk bergerak lebih otonom dan tanpa beban pelaporan dan akuntabilitas formal kepada donor.

Lebih lanjut, gerakan orang muda ini juga berkembang dalam tiga bentuk kolektif utama:

1. **Kolektif berbasis isu**. kolektif ini berfokus pada isu spesifik dan dibentuk melalui media sosial. Beberapa contoh misalnya anti-pelecehan seksual seperti *#NamaBaik* dan *#KitaAgni*, yang muncul sebagai respons terhadap kasus pelecehan seksual di kampus. Kelompok ini menggunakan strategi gabungan antara aktivisme daring dan luring, termasuk kampanye digital, diskusi publik, dan aksi jalanan. Sebanyak 62% responden muda dalam survei pernah terlibat dalam setidaknya satu kolektif berbasis isu, terutama dalam gerakan lingkungan dan anti-pelecehan seksual (Survei SMK, September 2024).
2. **Kolektif berbasis kampus**. Kelompok ini berakar di lingkungan kampus, tetapi sering terhubung dengan gerakan sosial yang lebih luas. Contohnya termasuk Aliansi Mahasiswa UGM (Koor. Aliansi Mahasiswa UGM, wawancara, September 5, 2024), Gerakan Aktivis Mahasiswa Trisakti, dan kolektif-kolektif serupa di kampus lainnya. Mereka memainkan peran penting dalam gelombang demonstrasi nasional memprotes UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2019-2020. Seorang mahasiswa UI mencatat bahwa isu yang mereka hadapi saat ini melampaui lingkungan kampus dan terhubung langsung dengan ketidakadilan struktural, seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi (wawancara, 12 September 2024).
3. **Kolektif seni-aktivisme**. Kolektif ini menggunakan seni dan budaya sebagai medium aktivisme politik. Mereka memproduksi mural, poster, musik, video, dan bentuk seni lainnya untuk menyampaikan isu sosial. Contohnya termasuk kolektif Taring Padi (Yogyakarta), Kolektif Betina (Jakarta), dan kolektif seni jalanan lainnya.

Tak hanya itu, beberapa kolektif juga terlihat membangun hubungan dengan OMS terinstitusionalisasi. Misalnya Bandung Bergerak, yang berperan sebagai media independen yang mempromosikan kebebasan berekspresi melalui jurnalisme warga dan pelibatan komunitas muda dalam pelatihan serta peliputan. Melalui pendekatan ini, Bandung Bergerak menjembatani berbagai elemen dalam jaringan gerakan sosial berbasis *rhizoma* dan memperluas konektivitas antar komunitas di Bandung dan sekitarnya. Sementara di Yogyakarta, *Social Movement Institute* (SMI) memainkan peran serupa dengan menyelenggarakan Festival Literasi dan Festival Keadilan di kota-kota kecil, sebagai ruang solidaritas atas kasus hukum Harris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. SMI juga berperan sebagai penghubung berbagai elemen gerakan tapak dan jaringan advokasi yang lebih luas.

Singkatnya, gerakan orang muda di Indonesia menunjukkan potensi signifikan dalam memperkuat ekosistem masyarakat sipil. Mereka memiliki kemampuan mobilisasi massa yang luas dan cepat, sebagaimana terlihat dalam demonstrasi *#ReformasiDikorupsi* (2019) dan aksi protes terhadap UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mampu menggerakkan ribuan orang dalam waktu singkat. Gerakan ini juga menciptakan inovasi taktis dengan mengembangkan bentuk-bentuk aktivisme baru yang mengintegrasikan ruang daring dan luring, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pesan. **Melalui media sosial, gerakan orang muda dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, melampaui batas-batas tradisional gerakan sosial dan mendorong solidaritas lintas kelas yang lebih inklusif. Mereka juga memperkenalkan perspektif baru dalam diskursus politik—seperti interseksionalitas, feminisme digital, dan keadilan iklim—yang memperkaya agenda demokrasi di Indonesia.**

Namun di balik potensinya, gerakan orang muda kerap bersifat sporadis dan reaktif, sehingga kesulitan membangun momentum jangka panjang. Struktur *rizomatik* yang fleksibel juga rentan terhadap fragmentasi dan sulit melakukan konsolidasi kekuatan untuk perubahan sistemik. Selain itu, represi digital melalui UU ITE dan serangan siber menjadi ancaman serius. **Gerakan ini juga tidak sepenuhnya kebal terhadap polarisasi politik dimana beberapa kelompok mulai terpecah berdasarkan garis ideologis atau identitas tertentu, yang berpotensi melemahkan solidaritas gerakan.**

Mengacu pada konsep *rizomatik* yang dikembangkan Sastramidjaja (2019; 2023), **gerakan orang muda di Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dari model gerakan sosial tradisional yang lebih terinstitusionalisasi:**

- **konektivitas tinggi dan saling terhubung melalui jaringan digital** yang memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya dengan cepat;
- **heterogenitas** yang mencakup beragam isu, identitas, dan pendekatan taktis yang berbeda, namun saling berhubungan;
- **multiplisitas** di mana gerakan ini dapat memunculkan berbagai bentuk mobilisasi secara simultan di berbagai lokasi;
- **struktur anti-hierarkis** yang menolak kepemimpinan tradisional dan mendukung pengorganisasian horizontal;
- **adaptabilitas** yang memungkinkan respon cepat terhadap situasi politik terkini, sekaligus mengembangkan taktik baru dalam merespons represi.

Gerakan tapak orang muda merupakan elemen penting dalam ekosistem masyarakat sipil Indonesia kontemporer. Mereka membawa inovasi dalam strategi, taktik, dan wacana, sehingga berpotensi berkontribusi dalam mendorong konsolidasi agenda-agenda demokrasi di tengah kemunduran demokratis. **Namun, untuk memaksimalkan potensi transformatif ini, diperlukan jembatan yang lebih kuat antara gerakan orang muda dengan OMS institusional dan non-institusional, serta strategi kolektif untuk menghadapi tantangan struktural, seperti represi digital dan polarisasi sosial-politik.**

Terakhir, **gerakan orang muda menunjukkan bahwa di tengah kemunduran demokrasi, terdapat bentuk-bentuk baru kewarganegaraan demokratis yang bermunculan—khususnya di kalangan generasi pascareformasi. Mereka menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.**

Boks 10. Temuan 4: Politik “Baru”?

Gerakan orang muda dalam lanskap OMS ditandai dengan:

1. **Model Organisasi Rizomatik:** Struktur lebih horizontal, cair, namun berjejaring, yang memungkinkan mobilisasi cepat dan pengambilan keputusan inklusif—berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional.
2. **Independensi Pendanaan:** Bergerak dengan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau *crowdfunding* memberi otonomi politik lebih besar, serta membebaskan mereka dari beban pelaporan formal kepada donor.
3. **Bentuk Kolektif Beragam:** Pola organisasi dominan berkembang dalam kolektif berbasis isu (*#NamaBaik* dan *#KitaAgni*), kolektif berbasis kampus (Aliansi Mahasiswa UGM) dan kolektif seni-aktivisme (Taring Padi dan Kolektif Betina).
4. **Hubungan Kompleks dengan OMS Institusional:** Terdapat tiga pola relasi, yaitu (1) kolaborasi strategis untuk kampanye spesifik, (2) ketegangan dan kritik atas sikap OMS institusional yang dianggap terlalu kaku, dan (3) upaya regenerasi dan transformasi oleh beberapa OMS untuk lebih terhubung dengan gerakan orang muda.
5. **Potensi Transformatif:** Kekuatan mobilisasi massa (*#ReformasiDikorupsi*, anti-UU Cipta Kerja), inovasi taktis, jangkauan lintas kelas, dan pembaruan wacana (interseksionalitas, feminisme digital, dan keadilan iklim) menunjukkan potensi untuk berkontribusi dalam memperbaharui agenda gerakan pro-demokrasi.
6. **Warisan Orde Baru:** Karakter yang sporadis dan reaktif, fragmentasi organisasional, ketiadaan proyek politik kolektif, represi digital (UU ITE), dan polarisasi politik tetap menjadi hambatan bagi efektivitas jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini memetakan berbagai kontradiksi yang mewarnai gerakan masyarakat sipil Indonesia di tengah era kemunduran demokrasi. Berdasarkan analisis terhadap 30 OMS dan wawancara dengan 50 perwakilan organisasi, serta survei terhadap 135 responden muda, kami mengidentifikasi **lima temuan utama yang menunjukkan bagaimana proses teknikalisisasi dan depolitisasi memengaruhi kapasitas OMS dalam mendorong agenda demokratisasi:**

- **Dilema antara profesionalisme dan perjuangan program OMS**

Sejak 1980-an, OMS mengalami lonjakan pertumbuhan seiring meningkatnya minat terhadap demokrasi. Namun, dalam konteks rekonfigurasi kekuasaan global dan penguatan logika efisiensi organisasi yang menekankan luaran program, OMS telah menjadi arena perjuangan baru. Dalam kondisi ini, sumber pendanaan internasional terus menekan OMS pro-demokratis untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan negara dan manajerialisme, demi keberlanjutan OMS. Kondisi ini turut membatasi kemampuan OMS untuk membangun konsolidasi politik yang menantang kekuasaan negara.

- **Fragmentasi internal dan tantangan konsolidasi**

Pluralitas OMS Indonesia menambah tantangan bagi konsolidasi masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial dan politik. Dengan mempertimbangkan kondisi OMS Indonesia yang sangat beragam, dari segi sektor dan tingkat institusionalisasinya, penelitian ini membagi mereka dalam dua bentuk utama: a) OMS terinstitusionalisasi yang berorientasi pada program pembangunan, serta b) OMS non-institusional yang dekat dengan gerakan akar rumput. Secara lebih spesifik, OMS yang fokus pada program pembangunan juga terbagi dalam dua sektor: a) sektor dengan fitur ekonomi-politik dan struktural yang kuat (tanah dan lingkungan), serta b) sektor dengan persoalan ekonomi-politik dan struktural yang kurang intens.

- **Teknikalisasi dan hambatan transformasi sosial-politik OMS**

OMS terinstitusionalisasi cenderung mengalami tingkat teknikalisasi tinggi karena kinerjanya ditentukan oleh siklus proyek yang menekankan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Meskipun kapasitas manajerial ini memperkuat akuntabilitas OMS, namun hal tersebut juga mengarah pada proses teknis yang tak berujung. Ketergantungan pada kapasitas manajerial dan logika donor ini justru membatasi ruang gerak OMS institusional dalam mendorong reformasi sosial dan politik, dibandingkan dengan OMS non-institusional/organik.

- **Model rizomatik dalam gerakan orang muda**

Sebagai bagian dari gerakan akar rumput di berbagai wilayah di Indonesia, aktivisme mahasiswa juga ditandai oleh keragaman. Berbagai aliansi terbentuk, di dalam dan luar kampus. Merujuk pada masukan dalam proses diseminasi temuan, kami menekankan bahwa salah satu karakter yang menonjol dalam aktivisme generasi muda kontemporer tercermin dari **mode gerakan rizomatik**—yang bersifat horizontal, cair, dan tersebar. Contoh nyata dari model ini adalah inisiatif seperti Aksi Kamisan, yang berkelanjutan secara organik dan tidak terinstitusionalisasi. Aksi Kamisan mengkondisikan ruang keterhubungan lintas isu dan generasi, bagi berbagai elemen gerakan sosial. Aksi Kamisan mempertemukan aktivis muda lintas sektor bertemu, juga dengan aktivis senior. Berawal dari pertemuan di Aksi Kamisan, mereka kemudian berdiskusi, dan memulai kegiatan lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerja mode rizomatik tidak bergantung pada struktur tertentu, tetapi pada jejaring sosial dan ideologis yang berkembang secara organik.

- **Mobilisasi akar rumput dan regenerasi gerakan sebagai praktik strategis OMS lokal**

OMS lokal memiliki cara kerja yang khas dalam memperkuat mobilisasi akar rumput. OMS ini secara sadar menolak menerima dukungan pendanaan dari organisasi donor, namun memprioritaskan dukungan dari jaringan lokal mereka. Strategi ini dijalankan untuk menjaga otonomi politik mereka, terutama dalam isu spesifik yang mereka tangani seperti hak atas tanah petani. Di berbagai kota, OMS lokal juga membangun jejaring dengan generasi muda selain mahasiswa, misalnya siswa SMK. Meskipun keterlibatan generasi muda dalam gerakan pro-demokrasi umumnya berumur pendek, hal ini berpotensi untuk memperkuat agenda keadilan sosial dan perlawanan kolektif terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menekankan pemahaman kontekstual tentang keberagaman strategi yang dijalankan OMS, di tengah kompleksitas masalah struktural yang mereka alami, akibat proses teknikalisasi dan depolitisasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa OMS menjalankan strategi yang sarat dengan kontradiksi dalam merespon penguatan ideologi dan kebijakan neoliberalisme, agar tetap mempertahankan koneksi mereka dengan konstituen akar rumput. Sementara gerakan akar rumput yang digerakkan oleh kaum muda juga menjamur dalam bentuk gerakan rizomatik yang lebih cair dan non-hierarkis. Gerakan ini memiliki lima ciri utama: berskala kecil dan menyebar luas, tanpa donor, bersifat sukarela, menggabungkan elemen aktivisme dan ekspresi budaya, dan dalam beberapa kasus dijumpai oleh OMS terinstitusionalisasi.

Meskipun gerakan masyarakat sipil di Indonesia mengalami hambatan struktural yang signifikan, temuan penelitian ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk memperkuat agenda demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan dukungan strategis untuk memperkuat kelembagaan OMS, sekaligus memperkuat hubungan mereka dengan berbagai kelompok sosial di tingkat tapak. OMS yang terinstitusionalisasi perlu didukung dalam meningkatkan pengaruh mereka terhadap proses perumusan kebijakan, sambil meminimalkan pemutusan hubungan dengan basis sosial mereka. OMS yang bersifat organik membutuhkan dukungan ruang fisik, pendanaan, dan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan dan menguatkan relasi mereka dengan berbagai kelompok masyarakat, tanpa terjebak ke dalam logika teknikalisasi dan depolitisasi.

Terakhir, penelitian ini bertujuan membuka jalan bagi pengembangan praksis terkait masyarakat sipil sebagai motor perubahan sosial yang progresif. Di tengah kemunduran demokrasi, resiliensi gerakan masyarakat sipil tetap terlihat, terutama melalui kemunculan model-model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. **Fenomena ini mencerminkan kontradiksi mendasar dari gerakan masyarakat sipil Indonesia—berakar pada penguatan basis sosial yang beragam, namun menyebar melalui jejaring organik yang adaptif terhadap dinamika politik kontemporer.**

Boks 11. Rekomendasi Berbasis Riset

Menjembatani OMS Institusional, Organik dan Komunitas Tapak

- Kembangkan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan keterampilan akuntabilitas formal dan keterlibatan politik transformatif
- Bangun kapasitas OMS institusional untuk mendorong konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada target mencapai luaran program yang kaku

Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi

- Desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik untuk membangun gerakan kolektif
- Prioritaskan bantuan legal dan keamanan digital, terutama bagi OMS yang bekerja di wilayah berisiko tinggi
- Dorong diversifikasi pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada donor tunggal

Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivistis

- Ciptakan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda secara setara.
- Dukung skema *peer mentoring* dua arah: aktivis senior memperkuat kapasitas advokasi formal dan narasi historis OMS; aktivis muda menyumbang inovasi digital dan membingkai isu secara kontemporer dan mobilisasi

Memperkuat Peran OMS Lokal

- Salurkan pendanaan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta)
- Fasilitasi jaringan berbagi sumber daya antar-OMS lokal dalam satu wilayah geografis
- Prioritaskan dukungan bagi OMS lokal yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik

Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda

- Tawarkan dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal
- Dorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda dalam pengorganisasian dan taktik advokasi
- Dukung upaya dokumentasi dan pembelajaran dari model-model gerakan rizomatik

Memelihara Ekosistem Masyarakat Sipil yang Inklusif dan Adaptif

- Perkuat aliansi lintas sektor yang berdasarkan pada agenda demokrasi bersama
- Ciptakan ruang aman untuk refleksi kritis atas pendekatan depolitisasi dan teknikalisisasi OMS
- Perkuat strategi keselamatan digital dan fisik untuk aktivis dan komunitas tapak

Daftar Pustaka⁵

- Abidin, Hamid (n.d), “Mobilisasi Sumber Daya Untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Pembelajaran dan USAID-MADANI”. Jakarta USAID, fhi360.
- Anugrah, I. (2019). “Movements for Land Rights in Democratic Indonesia”, in *Activist in Transition* edited by Dibley, T., and Ford, M. Cornell University Press, pp 79–87.
- Anugrahadi, Liputan6.com. (2019, December 23). 4 demo goyang Jakarta di 2019, dari buruh hingga pelajar STM. Liputan6 2019 <https://www.liputan6.com/news/read/4135909/4-demo-goyang-jakarta-di-2019-dari-buruh-hingga-pelajar-stm?page=5>
- Arif, A. (2024). Catatan Kritis Reforma Agraria di Era Joko Widodo. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/24/catatan-kritis-reformasi-agraria-di-era-joko-widodo>
- Aspinall, E. (2012). Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism. In M. L. Weiss and E. Aspinall (Eds.), *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* (pp. 53–180). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Antlöv, H, Brikenhoff, D.W., dan Rapp, E. 2010. “Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia.” *Voluntas* 2: 417-439.
- Beitinger-Lee, V. (2009). “Civil Society and Political Change in Indonesia.” USA: Routledge.
- Beitinger-Lee, V. (2013). (Un) civil society and political change in Indonesia: a contested arena. Routledge.
- Bornschiefer, S, and Kriesi, H. (2011). “The Populist Right, the Working Class, and the Changing Face of Class Politics. In Rydgren, Jens (ed). *Class politics and the radical right* (pp. 10-30). Routledge.
- Cahyono, E. (2022). *Reforma Agraria dan Cita-Cita Kemerdekaan: Sudah Sampai Mana?* Sajogyo Institute. <https://sajogyo-institute.org/reforma-agraria-dan-cita-cita-kemerdekaan-sudah-sampai-mana/>
- Caraway, T., dan Ford, M. (2019). “Indonesia’s labor movement and democratization.” *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Cornell University Press, Ithaca, pp 61–79.
- Carroll, T. (2010). *Delusions of Development: The World Bank and the Post-Washington Consensus in Southeast Asia*. Springer.
- Carroll, T., dan Darryl SL Jarvis. (2015). “The New Politics of Development: Citizens, Civil Society, and the Evolution of Neoliberal Development Policy.” *Globalizations* 12.3: 281–304.
- Carroll, T., dan Jarvis, D.S.L. (2015). “Markets and Development: Civil Society, Citizens and the Politics of Neoliberalism.” *Globalization* 12, no. 3: 277–280.
- Carothers, T. (2004). “Political Party Aid.” Swedish International Development Agency. Washington, DC, online: <https://gsdrc.org/document-library/political-party-aid/>
- Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: Sage publications.
- Datzberger, S. (2015). Peace Building and the Depoliticisation of Civil Society: Sierra Leone 2002–13. *Third World Quarterly*, 36(8), 1592–1609. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1043990>
- Deleuze, G and Guattari, F. (1987). *A Thousand Plateaus*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Firmansyah. MA. (2023), *Konser Musik Cadas untuk Dago Elos, Bandung Bergerak*, 12 Desember. <https://bandungbergerak.id/article/detail/159189/konser-musik-cadas-untuk-dago-elos>
- Ford Foundation. (2024). Grants Database “Gemawan”. Ford Foundation. <https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/awarded-grants/grants-database/?search=gemawan>

5 Tidak semua referensi ini muncul dalam teks, tapi kami memutuskan tetap memasukkannya karena dengan satu atau lain cara telah menginspirasi analisis yang kami gunakan dalam laporan ini.

Daftar Pustaka

- Ford Foundation. (2024). Grants Database "Pikul". Ford Foundation. <https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/awarded-grants/grants-database/?search=pikul>
- Fukuyama, F. (1989). "A Reply to My Critics." *The National Interest*: 21-28.
- Ganti, T. (2014) "Neoliberalism." *Annual Review of Anthropology* 43.1 (2014): 89-104.
- Gilley, B. (2017). *Technocracy and Democracy as Spheres of Justice in Public Policy*. *Policy Sci*, 50, 9-22. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-016-9260-2>
- Hadiz, V.R. (2017). "Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53.3: 261-278.
- Haryanto, Rahmawati, D and Lay, C (2023). "elit Interaction in Indonesia at the local level: A Case Study of Makassar and Kupang", in Norren-Nilsson, A., Savirani, A., and Uhlin, A. *Civil Society elits in Cambodia and Indonesia* pp 159-194. NIAS Press.
- Harney, S., dan Olivia, R. (2003). *Civil society and civil society organisations in Indonesia*. Geneva: International Labour Office.
- Hoelman, et.al., (2021). *Riset Pembentukan Dana LSM di Indonesia Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia*. Jakarta: INFID.
- Kemmis, S., McTaggart, R., dan Nixon, R. (2013). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer Science dan Business Media.
- Kooy, M and Bakker, K. (2008) *Technologies of Government: Constituting Subjectivities, Spaces, and Infrastructure in Colonial and Contemporary Indonesia*, *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol 32.2, June, pp 375-391.
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. London: Duke University Press.
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Digital activism in Asia reader*, 127-154.
- Lorch, J. (2022). "elit capture, civil society and democratic backsliding in Bangladesh, Thailand and the Philippines." *Democratization* 28.1: 81-102.
- Madani (2022). *Eight Steps for Thematic Action Interventions, Annex 18*. MADANI USAID. Available online: <https://www.madani-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/01/Eight-Steps-for-Thematic-Action-Interventions.pdf>
- MacLean, J. (1999). *Towards a Political Economy of Agency in Contemporary International Relations*. In Martin Shaw (Ed.), *Politics and Globalisation, Knowledge, Ethics, and Agency*. First Edition. London: Routledge <https://doi.org/10.4324/9780203165409>
- Mouffe, C. (1983). "Working-class hegemony and the struggle for socialism." *Studies in Political Economy* 12.1: 7-26.
- Mietzner, M. (2024). "The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elit competition in a compromised democracy." *Third World Quarterly*: 1-17.
- Muharram, Y. (2024), *Musik dari Orang Muda Bandung Membela Dago Elos*, Bandung Bergerak 11 Oktober. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1598118/musik-dari-orang-orang-muda-bandung-membela-dago-elos>
- Norén-Nilsson, A, Savirani, and Uhlin, A. (2022). *Introduction Studying Civil Society elits Formation and Interaction*. In Norren-Nilsson, A, Savirani, and Uhlin, A (Eds), *Civil Society elits Field Studies in Cambodia and Indonesia* (pp 1-23). NIAS Press.
- Novaris, P. (2024). *Perlawanan Rakyat Dago Elso di Meja Hijau*, 18 Fakta Persidangan yang Menjerat Keluarga Muller, Bandung Bergerak, 22 Oktober. Link: <https://bandungbergerak.id/article/detail/1598183/perlawanan-rakyat-dago-elos-di-meja-hijau-18-fakta-persidangan-yang-menjerat-keluarga-muller>

Daftar Pustaka




- Ramcilovic-Suominen, S. (2024). Democracy through Technocracy? Reinventing Civil Society as a State-Monitored and Unpaid Service Provider in the EU FLEGT VPA in Laos. *Global Environmental Change*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2024.102809>
- Robet, R. (2008). "Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." Jakarta: Elsam.
- Rodan, G. (2022). *Civil society in Southeast Asia: power struggles and political regimes*. Cambridge University Press.
- SAFENet. (2024). Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Januari-Maret 2024. Denpasar: SAFENet.
- Sastramidjaja, Y. (2019). Student Movements and Indonesia's Democratic Transition. In T. Dibley and M. Ford (Eds.), *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia* (pp. 23-40). Ithaca: Cornell University Press.
- Sastramidjaja, Y. (2023), "Rhizome vs regime: Southeast Asia's digitally mediated youth movements", *Trends in Southeast Asia*, No. 6. Singapore ISEAS.
- Sastramidjaja, Y. (2019), "Students Movement and Indonesia's Democratic Transition", in *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Cornell University Press, Ithaca, pp 23-40.
- Saturi, S. (2024). Konflik Agraria Tinggi, 5 Rekomendasi KPA pada Presiden Baru. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2024/02/12/konflik-agraria-tinggi-5-rekomendasi-kpa-pada-presiden-baru/>
- Savirani, A., and Ersada, H (Forthcoming 2025), "Disinformation in Yogyakarta Student Movement 'Gejayan Calling'", edited by Sastramidjaja, Y. "Digital Democracy in Southeast Asia".
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic Legalism. *The University of Chicago Law Review*, 85(2), 545-584. <https://www.jstor.org/stable/26455917>
- Suherman, I. (2024), 8 Tahun Melawan, Dago Elos Menag dan Duo Muller Divonis 3,5 Tahun Bui. *Pikiran Rakyat* 14 Oktober. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018670128/8-tahun-melawan-dago-elos-menang-dan-duo-muller-divonis-35-tahun-bui>
- Thea DA, A. (2021). 8 Ancaman PP Bank Tanah Terhadap Reforma Agraria. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/8-ancaman-pp-bank-tanah-terhadap-reforma-agraria-lt60abb177a188a/?page=3>
- Törnquist, O (2009). Introduction The Problem is Representation: Towards an Analytical Framework. In O Törnquist, N Webster, K Stokke (Eds), *Rethinking Popular Representation* (pp 1-124). Palgrave Macmillan.
- Thurston, A. (2018). The Politics of Technocracy in Fourth Republic Nigeria. *African Studies Review* 61, Issue 1, pp. 215-238.
- Warburton, E., dan Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285. <https://www.jstor.org/stable/26798854>
- Weakliem, D.L., and Adams, J. (2011). "What do we mean by 'class politics'?" *Politics and Society* 39.4: 475-495.
- Weiss, M., dan Hansson, E. 2023. "Civil Society in Politics and Southeast Asia in Civil Society: Conceptual Foundations." Dalam *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society*, diedit oleh Meredith Weiss dan Eva Hansson, 1-23. Routledge.

5 Tidak semua referensi ini muncul dalam teks, tapi kami memutuskan tetap memasukkannya karena dengan satu atau lain cara telah menginspirasi analisis yang kami gunakan dalam laporan ini.




Daftar Pustaka

- Wicaksono, P. (2024). H-1 Jokowi ke Yogyakarta, Massa Jogja Memanggil Pajang Replika Guillotine di Depan Istana. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/h-1-jokowi-ke-yogyakarta-massa-jogja-memanggil-pajang-replika-guillotine-di-depan-istana-15221>
- Wilson, I. (2019). "Urban Poor Activism and Political Agency in Post-Soeharto Jakarta", in *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Cornell University Press, Ithaca, pp 99-116
- Wood, M. and Flinders, M. (2015). *Rethinking Depoliticisation: Beyond the Governmental*. In M. Flinders and M. Wood (Eds.), *Tracing the Political: Depoliticisation, Governance, and the State* (pp. 21-46). Bristol: Policy Press.
- YAPPIKA. (2023). *Laporan Akhir Pemetaan Kapasitas CSO dalam Isu Krisis Iklim dan Tata Guna Lahan*. Jakarta: YAPPIKA.

Asia Research Centre Universitas Indonesia

-  Ruang Cendekia Multiguna Jakob Oetama
Gedung H, lantai 6, FISIP UI
-  asiaresearchcentre@ui.ac.id
-  arc.ui.ac.id

Research Centre for Politics and Government Universitas Gadjah Mada

-  Gd. BA FISIPOL UGM, Lt. 4, R. BA 403
Jl. Socio Yusticia 1, Bulaksumur, Yogyakarta
-  polgov@ugm.ac.id
-  polgov.fisipol.ugm.ac.id